

**PROSES POLITIK BERLAPIS DALAM
GERAKAN RESTORASI SUNGAI***Jurnal Analisa Sosiologi*
April 2022, 11 (2):326 - 349**Siti Zunariyah¹, Suharko², Suharman³****Abstract**

This article discusses river restoration movement through analytical frame of multilayered political process of river restoration movement. River restoration movement is very important to study, not only because of limited social science literature on this theme, but also because of the uniqueness of movement dynamic from one region to another. Method selected was an explanatory case study to explain the multilayered political process occurring in river restoration movement conducted by Forsidas Gajah Wong Yogyakarta. The first layer is base or grassroots of movement becoming an important keyword to be tipping point of the movement by building common consciousness of the urgency to recover degraded river. The process of consolidation and of building shared point of view is an unforgettable part despite spatial-scale implementation. The second layer consists of policy maker elites and central actors serving as the activator of the support raising process at either executive or legislative level. In addition, building social network between river communities reinforce the processes at base and elite levels. The procedure of movement is as follows: (1) preparing the people socially by means of building common consciousness and equating the perspectives among the people living in the river bank; (2) building consolidation between the people living in the river bank connected spatially to each other through Forsidas Gajah Wong institution; (3) raising support, lobby, and advocacy from policy makers including executives and legislatives to contribute to the process of organizing settlement along the river and rubbish and waste processing facility to reduce river degradation rate; (4) joint action constitutes mutual cooperation (gotong royong) and selfhelp in the attempt of restoring river ecosystem; and (5) reflection and movement evaluation processes. The important contribution of current research is related to the importance of multilayered political process in the procedure and the dynamic of river restoration movement.

Keywords: *River Restoration Movements, Multilayered Political Process and Social Networks*

Abstrak

Artikel ini adalah tentang gerakan restorasi sungai melalui kerangka analisis proses politik berlapis gerakan restorasi sungai. Gerakan restorasi sungai sangat penting untuk dikaji, tidak hanya karena minimnya literatur ilmu sosial dalam tema ini, namun juga karena keunikan dinamika gerakan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Metode yang dipilih adalah studi kasus yang bersifat eksplanatoris untuk menjelaskan proses politik berlapis yang terjadi pada gerakan restorasi sungai yang dilakukan oleh Forsidas Gajah Wong Yogyakarta. Lapis pertama adalah lapis basis atau grassroot

¹ Universitas Sebelas Maret

^{2,3} Universitas Gadjah Mada

¹ Email Korespondensi: zunariyah@mail.ugm.ac.id

gerakan menjadi kata kunci penting untuk menjadi titik ungkit gerakan dengan membangun kesadaran bersama tentang urgensi memulihkan kembali sungai yang terdegradasi. Proses konsolidasi dan membangun kesamaan cara pandang menjadi bagian yang tidak terlupa meskipun dilakukan dalam skala spasial. Lapis kedua adalah lapis elit pengambil kebijakan dan peran aktor sentral yang menjadi motor penggerak dalam proses menggalang dukungan baik pada jalur eksekutif maupun legislative. Selain itu, membangun jejaring sosial antar komunitas sungai menjadi penguat proses-proses pada level basis dan level elit. Tahapan gerakan ini yaitu; (1) melakukan persiapan sosial masyarakat dengan cara membangun kesadaran bersama dan menyamakan cara pandang antar warga bantaran sungai; (2) melakukan konsolidasi antar warga bantaran sungai yang terhubung secara spasial antar wilayah sungai dalam wadah Forsidas Gajah Wong; (3) menggalang dukungan, lobby dan advokasi dari para pengambil kebijakan dari unsur eksekutif dan legislative untuk berkontribusi dalam proses penataan pemukiman sepanjang sungai dan sarana pengolahan sampah dan limbah agar mengurangi laju degradasi sungai; (4) aksi bersama berupa gotong royong dan swadaya dalam rangka restorasi ekosistem sungai; dan (5) proses refleksi dan evaluasi gerakan. Kontribusi penting penelitian ini adalah pentingnya proses politik yang berlapis dalam tahapan dan dinamika gerakan restorasi sungai.

Kata Kunci: Gerakan Restorasi Sungai, Proses Politik Berlapis dan Jejaring Sosial

PENDAHULUAN

Gerakan restorasi sungai adalah upaya untuk memulihkan kembali sungai yang mengalami pencemaran dan degradasi yang disebabkan oleh factor manusia maupun factor alamiah. Gerakan restorasi sungai bertujuan untuk mengembalikan fungsi jasa ekosistem sungai (ecosystem services) yang mengalami degradasi dan kerusakan, jasa tersebut terdiri atas jasa penyediaan (provisioning services), jasa pengaturan (regulating services), jasa budaya (cultural services) dan jasa pendukung lainnya (supporting services). Jasa ekosistem sungai diyakini bernilai karena mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan manusia (Millenium Ecosystem Assessment, 2005; Vermaat, dkk., 2016). Dengan begitu, gerakan restorasi sungai dapat menjadi salah satu pilar pendukung Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam konteks sosiologis, gerakan restorasi sungai adalah salah satu varian gerakan lingkungan. Gerakan yang menyebar sejak dua dekade terakhir ini tidak hanya populer di Amerika dan Eropa, akan tetapi juga meluas hingga Asia dan Afrika. Setidaknya terdapat dua alasan utama yang

mendorong kemunculan gerakan ini. Pertama, hampir 80% populasi dunia saat ini terparah oleh ancaman terhadap keamanan habitat air sungai yang mengalami degradasi. World Water Council memperkirakan bahwa lebih dari setengah sungai di dunia tercemar atau beresiko mengering (Vörösmarty dkk., 2010). Kedua, berbagai bentuk kerusakan lingkungan, termasuk sungai telah membuka ruang politik baru bagi munculnya organisasi peduli lingkungan untuk mendorong upaya preservasi, konservasi bahkan restorasi (Rootes, 2004; Mertig dan Dunlap, 1994). Kedua alasan tersebut memperoleh legitimasi secara politis seiring ditetapkannya Dekade PBB tentang restorasi ekosistem pada tahun 2021 agar semua negara mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim (Frascaroli dkk., 2021). Karenanya, gerakan restorasi sungai memiliki urgensi dan konteks yang relevan secara ekologis maupun politis.

Literatur tentang gerakan restorasi sungai selama cenderung didominasi oleh kajian ilmu lingkungan, biologi dan geografi, sementara literatur ilmu sosial terutama kajian gerakan sosial masih sangat terbatas (Eden dan Tunstall, 2006). Semestinya kajian gerakan sosial terus dikembangkan karena bagian penting dari restorasi sungai adalah mengubah dan memperbaiki hubungan manusia dengan sungai (Fox dkk., 2017). Dalam konteks global, penelitian tentang gerakan restorasi sungai dapat direpresentasikan melalui Saraswati Nadi Bachao Andolan (SNBA) yang menjadi salah satu simbol gerakan restorasi sungai yang fenomenal, di India. Gerakan lingkungan ini berupaya menggugah kesadaran publik tentang pentingnya menghidupkan kembali sungai yang telah rusak dan mengalami degradasi. Gerakan ini tidak mengenal batas suku, usia, kasta, jenis kelamin dan profesi. Secara serentak mereka bersuara dan bertindak untuk sungai Saraswati yang lebih baik meski masing-masing bergerak dalam skala lokal. Namun, dengan spirit gerakan anti kekerasan untuk mendorong konservasi di sepanjang sungai, mereka terus berkampanye untuk memperoleh dukungan publik secara luas. Menariknya, gerakan ini disinyalir tidak didorong oleh kerangka ideologi tertentu, namun berpusat pada rasa kepedulian bersama terhadap kondisi sungai yang rusak akibat pembangunan bendungan (Patra dan Bandyopadhyay, 2019). Selain itu, gerakan restorasi sungai Elwha, di Amerika juga menjadi proses gerakan

lingkungan yang penting untuk memulihkan kembali ekologi sungai akibat pembendungan sungai untuk kepentingan pembangunan industri listrik. Ancaman penghidupan suku Elwha pedalaman yang menggantungkan hidupnya pada hasil ikan salmon dan pertanian lahan basah juga menjadi agenda restorasi. Melalui sejumlah peningkatan kapasitas masyarakat, pemulihan habitat dan ekologi sungai serta pengembalian situs tradisional suku Elwha, maka gerakan restorasi ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat ketika bencana akibat pembangunan sungai terjadi (Mauer, 2020).

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, kajian gerakan sosial dalam restorasi sungai hadir dalam beberapa penelitian. Pertama, tentang gerakan restorasi sungai Karang Mumus, Samarinda yang menggunakan strategi pendidikan lingkungan sebagai penanda untuk mengubah perilaku masyarakat dan memberikan efek bagi perbaikan kualitas fisik sungai. Partisipasi publik yang luas dan keterlibatan aktor non negara menjadi modal bagi keberhasilan restorasi sungai (Suharko dan Kusumadewi, 2019). Kedua, tentang upaya pemulihan Sungai Brantas melalui agensi LSM Ecoton. Ideologi kepedulian atas kerusakan sungai menjadi faktor penggerak gerakan, strategi yang dipilih dengan penelitian partisipatif, edukasi lingkungan, dan advokasi serta melibatkan media dalam setiap gerakan yang dilakukan (Sholihah dan Zunariyah, 2019). Ketiga, tentang gerakan anak muda kota dalam memproduksi pengetahuan warga untuk memperbaiki kondisi sungai di Kota Surakarta. Penelitian aksi ini mendorong partisipasi warga dalam memproduksi pengetahuan berbasis kampung dan sungai agar kepentingan warga terkait sungai terakomodir (Zunariyah dan Ramdhon, 2017b). Keempat, tentang Kongres Sungai Indonesia ke-III sebagai gerakan sosial dengan melihat proses kerjasama antar lembaga formal seperti pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kerjasama seperti ini bersifat saling mendukung dan kolaboratif sehingga menjadi taktik untuk memperlebar keberhasilan dan tujuan gerakan (Noviasari dkk, 2018).

Pada konteks global, penelitian tentang gerakan restorasi sungai yang ada cenderung didominasi oleh kerangka gerakan lingkungan terutama kerangka keadilan lingkungan, sedangkan penelitian dalam konteks

Indonesia cenderung didominasi oleh kerangka gerakan sosial baru yang menitik beratkan pada persolan strategi, tujuan dan ideologi gerakan. Dengan begitu, keenam penelitian tersebut diatas memiliki sejumlah kelemahan yaitu terlalu menekankan aspek rasionalitas dan kurang memberi perhatian terhadap aspek proses politik, jejaring sosial serta keberlanjutan gerakan. Demi menggenapi kelemahan dan kekurangan dari penelitian yang pernah ada maka, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dimensi proses politik dan proses pembentukan jejaring sosial serta upaya keberlanjutan gerakan restorasi sungai. Dengan demikian maka, kajian penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk memperkaya kerangka kajian tentang gerakan restorasi sungai secara lebih komprehensif.

Landasan teori yang dipilih untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah dengan menggunakan konvergensi perspektif teoritik antara perspektif struktur peluang politik dan perspektif jejaring sosial. Perspektif pertama meyakini bahwa gerakan sosial bukanlah tidak rasional, tidak sekedar kemampuan melakukan pengerahan sumberdaya, akan tetapi memberikan tautan antara rakyat dan institusi politik dalam bentuk kesempatan politik sebagai faktor penting dalam kebangkitan gerakan sosial (Tarrow, 1994). Perspektif kedua memiliki asumsi bahwa jejaring sosial memiliki kedudukan penting dalam gerakan sosial karena menjadi tempat muncul dan dibangunnya fondasi gerakan sosial, tempat pertentangan lokal dikomunikasikan, diekspresikan dan disebarluaskan kepada khalayak luas serta gerakan sosial dibangun diatas jaringan sosial yang terletak pada ruang fisik dan budaya tertentu (Diani, 2003). Upaya konvergensi teoritik tersebut diharapkan mampu memotret dinamika gerakan secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengambil setting pada gerakan restorasi sungai Gajah Wong di Kota Yogyakarta. Strategi yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan studi kasus tunggal yang bersifat eksplanataris khususnya untuk menjawab pertanyaan “how” dan “why” (Yin 1996). Adapun subyek penelitiannya adalah komunitas sungai yang tergabung di dalam Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Gajah Wong di Kota

Yogyakarta. Alasan mengambil setting sungai Gajah Wong karena predikat sungai tercemar dan kawasan bantaran sungai yang kumuh telah melekat beberapa tahun silam, namun proses restorasi terus dilakukan hingga sejumlah perbaikan kondisi ekologis dapat dijumpai di sepanjang kawasan sungai. Subyek penelitian adalah anggota dan pengurus komunitas Forum Silaturami Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Gajah Wong. Informan-informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Jenis data meliputi data primer berupa wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) serta pengamatan terlibat. Sementara itu, dokumen data sekunder yang relevan dan bersumber dari komunitas, dinas lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya dipergunakan untuk mendukung proses analisis. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan analisis data terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pasca dirilisnya Dekade PBB tentang restorasi ekosistem untuk memastikan wilayah-wilayah perkotaan mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, maka gerakan restorasi ekosistem meluas di berbagai negara. Pada perkembangannya, gerakan restorasi sungai menjadi lebih populer karena sungai menjadi ekosistem penting dalam menjaga keberlanjutan wilayah perkotaan. Gerakan restorasi sungai dipandang mampu menawarkan narasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta membawa alam pada kondisi yang bersih dan sehat bagi semua makhluk di dalamnya (Maryono, 2007). Gerakan ini semakin meluas karena didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memulihkan kembali lingkungan yang rusak agar terhindar dari apa yang disebut oleh Gerald Hardin sebagai “tragedy of commons” (Hardin, 1968). Sebagai salah satu “common good” sungai di Indonesia juga dihadapkan pada problem serius yang membutuhkan tindakan lokal dan kolektif.

Dalam konteks Indonesia, perhatian pemerintah terhadap sungai-sungai muncul melalui Proyek Sungai Sehat (Proyek Kali Bersih), Proyek Peningkatan Permukiman kota (Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kota), Proyek Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pemukiman) menjadi deretan proyek pemerintah untuk memperbaiki lingkungan fisik, biologis dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh dan liar di sepanjang sungai kota (Firman, 2004). Pelibatan masyarakat dalam bentuk komunitas maupun organisasi masyarakat sipil lain juga mewarnai beragam upaya memulihkan sungai (Kusnanto dkk, 2016).

Gerakan restorasi sungai semakin meluas semenjak Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai Negara poros maritim dunia, yang menjadi salah satu penggerak diselenggarakannya Kongres Sungai Indonesia pertama di Banjarnegara pada tahun 2015. Kongres pertama ini menghasilkan maklumat Serayu dengan memberikan sejumlah prioritas restorasi, terutama sungai-sungai di Jawa. Kongres tersebut terus berlangsung setiap tahun melalui KSI II di Malang, KSI III di Banjarmasin dan KSI ke IV di Jakarta. Kongres yang dihadiri oleh berbagai komunitas peduli sungai di seluruh Indonesia, sejumlah kementerian yang bertanggungjawab terhadap sungai, para akademisi dari berbagai perguruan tinggi serta sejumlah organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk melakukan koordinasi dan membangun kesepakatan bersama untuk sungai yang lebih baik. Serangkaian Kongres tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada para pengambil kebijakan terkait dengan sungai sekaligus memberi posisi penting dan strategis terhadap problem sungai dan upaya-upaya berbagai pihak untuk merestorasinya (Zunariyah & Ramdhon, 2017a).

Dalam konteks Yogyakarta, sejumlah prakarsa telah muncul jauh sebelum momentum Kongres Sungai Indonesia dalam bentuk agensi masyarakat sipil dalam program penataan bantaran kali pada tahun 1980-an. Aksi Romo Mangun menjadi penanda awal agensi masyarakat sipil menghilangkan citra “kumuh” di sempadan sungai di Yogyakarta (Khudori, 2002). Pada perkembangannya komunitas sungai di Code terus bertumbuh dan dilembagakan dalam forum Pemerti Kali Code pada tahun 2008 oleh

Walikota Yogyakarta. Aksi masyarakat sipil tersebut selanjutnya turut menggerakkan masyarakat di sepanjang sungai Winongo untuk membentuk Forum Komunikasi Winongo Asri (FKA). Sementara itu, pada wilayah sungai Gajah Wong muncul Forum Silaturahmi Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Gajahwong, Karangwaru Riverside (Kali Buntung), Dewa Bronto, dan Rembug Gondokusuman (Kali Belik) telah berkontribusi mewujudkan sungai bebas sampah. Agensi masyarakat sipil dalam memulihkan sungai semakin menguat dengan dibentuknya Asosiasi Komunitas Sungai Yogyakarta (AKSY) bersama sejumlah penggiat sungai di wilayah Sleman dan Bantul pada peringatan Hari Sungai Nasional pada 27 Juli 2013. Dengan begitu aksi-aksi tersebut menjadi bagian penting dari gerakan restorasi sungai Indonesia.

Agensi masyarakat sipil dalam gerakan restorasi sungai di Yogyakarta adalah bentuk respon public terhadap kondisi sungai-sungai yang mengalami degradasi sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu pesat, sementara sementara luas wilayah cenderung tetap. Pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta cenderung berdampak pada kemampuan daya dukung lingkungan termasuk dengan munculnya sejumlah pemukiman di bantaran sungai sejak tahun 1970an sebagai bagian dari imbas urbanisasi (Kutanegara, 2014). Labelling pemukiman kumuh lalu melekat pada kawasan bantaran sungai melalui sejumlah perilaku masyarakatnya yang membuang sampah dan limbah rumah tangga ke badan sungai, bahkan cenderung menempatkannya sebagai “river back” atau halaman belakang. Kondisi tersebut turut berkontribusi pada proses degradasi sungai. Sejumlah industri kecil, menengah bahkan besar juga tumbuh dan berkembang di Kota Yogyakarta. Limbah hasil proses produksi yang ada juga memperburuk kondisi sungai (Seftyono, 2012). Selain itu, salah satu kekhasan sungai-sungai di Yogyakarta adalah fungsinya sebagai aliran lahar dingin hasil erupsi gunung Merapi. Bencana lahar dingin yang mengalir melalui sungai-sungainya menjadi ancaman serius bagi penduduk yang bermukim di bantaran sungai bahkan ancaman bencana banjir maupun banjir lahar dingin.

Secara umum sumber pencemaran sungai-sungai di Yogyakarta berasal dari aktivitas manusia seperti rumah tangga, pertanian, jasa dan

industri. BLH Provinsi Yogyakarta melaporkan bahwa sumber pencemaran sungai berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, rumah sakit, hotel, industri pariwisata dan usaha kecil menengah lainnya. Hal itulah yang menyebabkan adanya residu tersuspensi, PH, kadar COD dan BOD yang menunjukkan pencemaran bahan kimia maupun organik telah masuk ke badan sungai (BLH, 2015).

Pembahasan

Kondisi pencemaran dan degradasi akibat pencemaran dan bencana banjir juga dialami oleh sungai Gajah Wong. Sungai Gajah Wong adalah salah satu dari tiga sungai yang terletak di Kota Yogyakarta, melintasi sebelah timur Kota Yogyakarta terutama 3 (tiga) Kapanewon yaitu Gondokusman, Umbulharjo dan Kota Gede, terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan dengan 17 (tujuh belas) Rukun Warga. Sungai ini memiliki panjang 20 km yang berhulu pada sejumlah sungai kecil yang Bersatu di daerah Kabupaten Sleman bagian Tenggara, selanjutnya mengalir ke arah selatan dan bertemu dengan sungai Opak di daerah Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2015, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merilis data bahwa sungai Gajah Wong mengalami pencemaran bahan organik maupun non organik yang cukup tinggi (BLH DIY, 2015). Hal ini disebabkan oleh masuknya berbagai limbah padat maupun cair dibuang ke badan sungai baik oleh industri maupun rumah tangga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Limbah tersebut mengandung logal berat, bahan beracun, minyak maupun mineral dari hasil pembuangan limbah industri penyamakan kulit, pelapisan perak, bengkel maupun cuci mobil. Kandungan logam berat yang relatif tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas air sungai, menimbulkan bau tak sedap dan menyebabkan timbulnya bibit penyakit. Demikian pula adanya kondisi bahwa kawasan bantaran sungai Gajah Wong menjadi salah titik pemukiman kumuh di Kota Yogyakarta, yang berprofesi rata-rata sebagai pemulung, tukang becak, peternak babi, pengamen dan citra penyakit sosial lainnya. Sebagian besar dari mereka masih melakukan pembuangan limbah cair maupun padat ke badan sungai, sehingga menambah beban pencemaran dari waktu ke waktu. Situasi

tersebut menimbulkan sejumlah kegelisahan pada sekelompok masyarakat yang terhubung pada bagian utara hingga selatan sungai Gajah Wong.

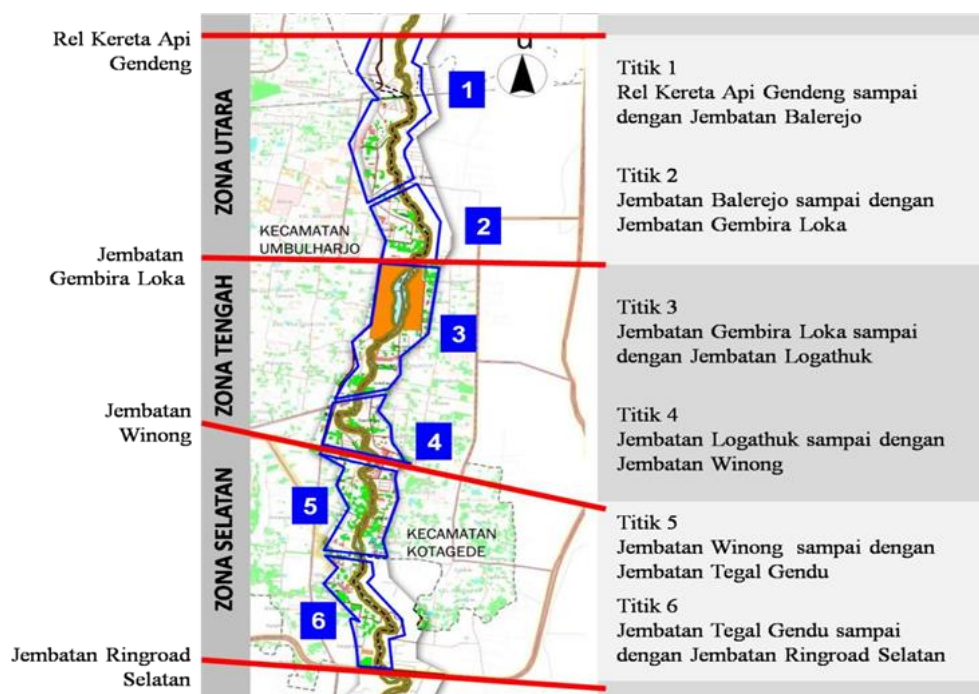
Kegelisahan dan kekhawatiran terhadap kondisi sungai Gajah Wong yang terus memburuk karena kurangnya kesadaran masyarakat menggugah inisiatif sejumlah pihak, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang telah melakukan inisiatif di tingkat RT untuk peduli dan memiliki rasa “*handarbeni*” terhadap lingkungannya, terutama sungai. Inisiatif pada tingkat mikro atau RT kurang signifikan dalam mendorong perbaikan kondisi sungai jika tidak dikomunikasikan dengan masyarakat lain, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Bagaimanapun karakteristik khas sungai yang mengalir dari hulu ke hilir mengandung konsekuensi aksi dan inisiatif yang terintegrasi satu sama lain.

Sejumlah aksi dan gerakan untuk memperbaiki kondisi sungai mengalami degradasi dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dalam bentuk kerja bakti di masing-masing wilayah RT atau RW. Padahal strategi ini sangat tidak efektif apabila tidak dilakukan secara serentak dari wilayah hulu hingga hilir sungai. Bahkan upaya membersihkan sampah-sampah yang bervolume besar tidak dapat dilakukan secara manual dengan peralatan terbatas, sehingga diperlukan bantuan peralatan yang lebih memadai. Sementara itu, keinginan masyarakat untuk mengembalikan kembali ekosistem sungai sangat tinggi, namun penuh dengan keterbatasan. Untuk itulah, maka sejumlah warga memiliki keinginan untuk membentuk suatu organisasi yang berfungsi untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam merawat dan melestarikan sungai.

Pada tahun 2011, Agus Susanto sebagai actor yang telah lama bergerak di tingkat RT mengembangkan kampung hijau mengambil inisiatif untuk mempertemukan sejumlah pengurus RT dan RW yang berbatasan langsung dengan sungai. Sederet pertemuan antar RT dan RW yang berjumlah 50 orang terus berjalan, hingga bulan kedelapan sejak rapat perdana, hingga tersisa 32 orang yang secara sungguh-sungguh bergabung dalam perkumpulan tersebut. Melalui fasilitasi dari BAPPEDA maka proses pelebagaan secara resmi diberikan kepada FORSIDAS Gajah Wong pada tanggal 25 April 2012 melalui pengukuhan Walikota Yogyakarta.

Secara kelembagaan, Forsidas memiliki visi menjadikan ekosistem sungai Gajah Wong yang bersih, indah, aman dan nyaman dalam kesatuan manajemen. Adapun misinya (1) memelihara dan melindungi keanekaragaman hayati sungai dan lingkungannya menjadi bersih, indah dan nyaman; (2) menjalin komunikasi aktif antar masyarakat atau stakeholders di sepanjang sungai Gajah Wong dalam satu kesatuan manajemen. Sejumlah tujuan dirumuskan yang terdiri dari (1) melaksanakan konservasi sungai; (2) membudidayakan rasa kepedulian masyarakat kawasan sungai dalam upaya menciptakan lingkungan sungai yang bersih, indah, aman dan nyaman; (3) menjadikan kawasan sungai sebagai laboratorium alam dan wahana pendidikan; (4) peningkatan wisata kawasan sungai di wilayah perkotaan; (5) memberdayakan masyarakat di kawasan sungai; (6) revitalisasi budaya atau kearifan local di kawasan sungai.

Sebagai upaya untuk mempermudah proses koordinasi antar wilayah utara, tengah dan selatan, maka Forsidas membagi wilayah menjadi tiga dan masing-masing wilayah dibagi ke dalam dua titik. Berikut ini adalah peta pembagian wilayah koordinasi:



Gambar 1: Peta wilayah Koordinasi Forsidas Gajah Wong
Sumber: Panduan Penataan Sungai Gajah Wong Tahun 2012

Pembagian wilayah kerja FORSIDAS Gajahwong didorong oleh karakter spasial yang membentang melintasi dua kecamatan yang berbeda. Dengan begitu, pembagian tersebut dapat mempermudah proses koordinasi antar warga untuk melakukan pemetaan masalah dan potensi wilayah sekaligus menjadi bagian awal dari gerakan restorasi sungai. Sebagaimana disampaikan oleh Agus Supriyanto dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kami menyadari bahwa antar wilayah bantaran sungai berbeda-beda, sehingga sebagai upaya awal kami melakukan diskusi dengan warga untuk memetakan bersama-sama aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik dan image atau citra tentang warga bantaran itu sendiri” (Wawancara 1 Maret 2022).

Proses ini tidak selesai dalam waktu singkat, namun melalui beberapa kali pertemuan dan diskusi dengan warga, terutama untuk menentukan skala prioritas terhadap permasalahan yang dijumpai. Proses negosiasi, tawar menawar bahkan konflik kepentingan yang ditandai dengan perdebatan sengit juga sering dijumpai dalam proses ini. Bagaimanapun warga bantaran sungai tidaklah berwajah tunggal dan mendiami wilayah tersebut bertahun-tahun. Dengan mengedepankan kepentingan bersama sekaligus semangat *“paseduluran”* antar warga bantaran sungai maka beberapa kesepakatan dalam diperoleh melalui proses tersebut. Hasil inilah yang menjadi modal penting dalam memulai proses restorasi kawasan sungai.

Amanah penting dibentuknya FORSIDAS adalah untuk menyelamatkan sungai terutama kualitas air sungai dengan memperbaiki kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang tinggal di bantaran sungai. Upaya tersebut meliputi perbaikan *mindset*, perilaku ataupun partisipasi aktifnya dalam forum antar wilayah (FORSIDAS Gajah Wong). Sebagaimana disampaikan oleh Agus Susanto:

“infrastruktur yang baik hanya dapat dibangun oleh SDM yang baik, jika memomorsatukan infrastruktur maka dia tidak akan bertahan lama karena SDM di sekelilingnya tidak memiliki kesadaran untuk merawat dan melestarikannya” (Wawancara 11 Maret 2022)

Festival Sungai Gajah Wong adalah bentuk pendekatan kultural juga ditempuh untuk membangun kesadaran warga tentang pentingnya merawat

sungai. Pendekatan kultural tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai Gajah Wong untuk membudidayakan hidup bersih dan sehat serta tanggap terhadap bahaya banjir. Dengan mengusung “*brand*” Gajah Wong sebagai serambi Mataram, menjadi cara untuk membangun ikatan secara kultural antara masyarakat bantaran sungai dan Kraton Yogyakarta. Hal ini diungkapkan oleh penanggungjawab festival Ibu Purbudi :

“Keberadaan Sungai Gajah Wong sangat penting dalam sejarah perkembangan Mataram karena melintasi sejumlah situs Kerajaan Mataram, salah satunya adalah Situs Warung Boto yang dibangun sejak Sultan Hamengkubowono II. Situs warung Boto dikenal sebagai salah satu lokasi pesanggrahan keluarga raja-raja mataram yang memiliki kolam pemandian dengan sumber air yang berasal dari Gajah Wong. Sehingga, merawat sungai Gajah Wong adalah penting agar anak cucu kita tidak melupakan sejarah perkembangan Kraton Jogja dengan sungai tersebut” (Wawancara tanggal 2 Desember 2022).

Upaya mengajak warga untuk hidup dengan prinsip “*Green and Clean*” serta tanggap bahaya dilakukan serentak melalui kerjasama dengan wilayah setempat di 9 kelurahan. Kegiatan dilaksanakan 14-21 April 2013 yang dimeriahkan berbagai acara yaitu bersih-bersih sungai Gajah Wong, pemutaran film tentang sungai dan pada hari itu diadakan pentas seni (menghadirkan gejog lesung, rebana, patok umbul), menanam bibit pohon, menebar benih ikan, pelepasan burung, diadakan beberapa jenis lomba (membatik, tumpeng, dan gethek). Rangkaian acara festival tersebut menjadi cara untuk menunjukkan bahwa warga bantaran sungai sedang “*gumregah*” untuk merawat dan merestorasi sungai Gajah Wong.

Dalam konteks gerakan sosial, upaya sosialisasi, diskusi maupun rembug warga adalah bagian penting dari proses politik pada level basis. Demikian pula pendekatan kultural melalui festival sungai Gajah Wong menjadi strategi penting dalam proses politik pada level basis. Hal ini menjadi modal penting untuk mendorong perubahan yang didukung oleh data sosial yang memadahi. Bagaimanapun soliditas aktor-aktor harus dibangun sejak awal untuk memastikan kesamaan cara pandang dan orientasi terhadap gerakan yang hendak dilakukan. Dengan begitu, proses

politik pada level basis ini menjadi fondasi berharga bagi gerakan FORSIDAS pada tahap-tahap berikutnya.

Proses politik pada level elit politik juga penting. Salah satu strateginya adalah dengan menghadirkan sejumlah elit politik untuk hadir dalam Festival Sungai Gajah Wong melalui saresehan yang bertemakan “*Diversity of Culture to be Hamemayu Hayuning Bawana*”. Sebagai Narasumber adalah Kepala PUP ESDM Propinsi DIY, Walikota Yogyakarta dan Konsultan dan Ahli Budaya Gembira Loka yang menjabarkan tentang Potensi Gajah Wong sebagai Kawasan Wisata. Dalam paparannya Walikota mengungkapkan bahwa permasalahan yang timbul dikarenakan keadaan tentang bagaimana warga hidup berdampingan dengan sungai. Pinggiran sungai yang ada di Yogyakarta telah digunakan sebagai tempat tinggal, bahkan pinggiran sungai masih menjadi daya tarik. Maka pembangunan yang akan dilakukan tidak akan terlaksana tanpa adanya kepedulian dan peran masyarakat. Beberapa hambatan yang akan dirasakan saat melaksanakan pembangunan wilayah pinggiran sungai Gajah Wong adalah belum semua pinggir sungai ditalud sehingga masih rawan saat terjadi bencana banjir. Untuk melaksanakan ini perlu juga dilaksanakan koordinasi lintas sektoral, maka perlu kerja sama dengan Pemerintah Propinsi DIY. Dalam forum ini pula disebutkan bahwa masalah lain yang dihadapi adalah jumlah penduduk di pinggiran sungai semakin padat sehingga mengakibatkan sungai cenderung menyempit. Masyarakat pinggiran sungai dianggap memiliki akses untuk mendapatkan manfaat dari proses penataan kawasan sungai. Jika sungai telah dijaga dengan baik diharapkan bisa ikut mengangkat potensi ekonomi wilayah.

Proses politik lain juga ditempuh dengan memanfaatkan bentuk ikatan kultural antara raja dan rakyatnya. Festival sungai Gajah Wong menghadirkan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Raja Yogyakarta untuk bertemu dengan rakyatnya di pinggir sungai yang secara turun temurun telah “*ngindung*” di bantaran sungai yang masih milik Kraton atau dikenal dengan istilah *wedi kengser*. Rakyat akan percaya terhadap semua “*titah*” dan perintah Raja, sehingga dengan menghadirkan Raja, maka rakyat diharapkan dapat patuh dan tunduk terhadap perintah raja, terutama perintah untuk menjaga dan merawat sungai Gajah Wong. Selain itu, posisi Sri

Sultan HB X sekaligus adalah sebagai Gubernur DIY yang memiliki peran besar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian menghadirkan Sultan adalah strategis agar upaya merestorasi sungai adalah sah secara kultural dan politik.

Proses politik di level basis dan elit pengambil keputusan diikuti dengan serangkaian aksi untuk menyelamatkan sempadan sungai dengan penataan pemukiman yang kumuh dan tidak teratur. Kondisi pemukiman tersebut disinyalir berkontribusi terhadap degradasi sungai, baik oleh pencemaran limbah padat ataupun limbah cair yang berasal dari pemukiman tersebut. Kampanye dan aksi M3K (*Mundur, Madhep, Mungghah Kali*) menjadi bagian penting untuk mengubah perilaku masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Artinya, kampanye ini adalah tentang upaya memundurkan, menaikkan dan menghadapkan rumah ke sungai. Warga yang rumahnya dipangkas untuk dijadikan jalan lingkungan untuk kepentingan sarana penghubung antar wilayah, jalur pemadam kebakaran dan upaya mitigasi bencana lainnya. Kampanye ini sekaligus merubah cara pandang masyarakat yang selama ini menempatkan sungai sebagai halaman belakang dan berubah menjadikannya sebagai halaman depan (Kutanegara, 2014).

Tujuan program M3K di bantaran sungai Gajah Wong adalah untuk meminimalisir akan adanya korban banjir ketika terjadi hujan deras. Rumah yang dimundurkan dan dinaikkan ini bertujuan untuk menghindari luapan air sungai. Setiap tahunnya beberapa daerah permukiman masyarakat yang dialiri sungai Gajah Wong selalu terendam banjir saat musim hujan bahkan pada saat hujan deras tahun 2009, ada rumah yang hanyut. Sehingga permukiman bantaran sungai Winongo tidak terendam banjir dan hanyut saat musim hujan. Selain itu, program, M3K ini juga bertujuan untuk memberikan ruang pembangunan akses jalan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan akses jalan penting artinya pada aktivitas harian warga sekaligus dapat digunakan untuk menghubungkan antara satu kampung dengan kampung lainnya. Sementara itu, pembangunan RTH adalah bagian dari upaya untuk menjaga agar keasrian bantaran sungai Gajah Wong tetap terjaga.

Selanjutnya, program, M3K ini diikuti dengan pengurusan legalitas tanah berupa “surat kekancingan” dari Panitikismo Kraton Yogyakarta. Hal ini bertujuan agar, warga yang terkena dampak program, tersebut memperoleh bantuan dari pemerintah. Pada tahap pembongkaran bangunan rumah, tentu tidak mudah, karena terkait dengan pengorbanan material warga yang harus “*legowo*” mengurangi sebagian rumahnya. Sikap tersebut tidak mungkin muncul, jika proses politik di tingkat basis maupun elit tidak membuahkan kesepakatan. Tahap berikutnya adalah renovasi bangunan yang dilaksanakan oleh satuan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) dan pemilik rumah. Persetujuan pembangunan rumah lalu menjadi tahap berikutnya jika pengajuan desan rumah yang dikerjakan disepakati bersama. Terakhir adalah pengerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas DPUPKP.

Upaya revitalisasi ataupun restorasi yang dilakukan FORSIDAS Gajah Wong bertujuan agar kondisi sungai dan lingkungan di kawasan sungai terbebas dari pencemaran sehingga mata air yang berada di sepanjang kawasan tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan bagi keperluan sehari-hari warga. Salah satu pemicu pencemaran adalah banyaknya sampah, limbah padat dan limbah cair yang telah akut. Berangkat dari itulah maka, pembangunan MCK (mandi Cuci Kakus) menjadi salah satu program ikutan yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi kepada warga agar hidup bersih dan sehat. Demikian pula dengan kampanye dan edukasi tentang larangan membuang sampah ke sungai kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang Bantaran Sungai Gajahwong. Mereka melatih masyarakat untuk membangun kebudayaan baru dengan memilah sampah sesuai jenisnya dan menghimpunnya ke dalam bank sampah yang dikelola secara mandiri. Pendekatan yang dipilih tidak hanya berupa edukasi dan kampanye secara langsung, namun juga dilakukan dengan pendekatan seni dan budaya pada festival sungai Gajahwong.

Keberadaan industri di area bantaran sungai Gajah Wong juga menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas air sungai. Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY menyebutkan bahwa sumber pencemaran sungai berasal dari limbah rumah tangga, rumah sakit, SPBU, Laboratorium Kesehatan, Laundry, restoran dan rumah tangga (BLH, 2015). Berbagai

sumber pencemar tersebut terus diadvokasi oleh Forsidas Gajah Wong melalui pembangunan IPAL Industri dan IPAL Komunal yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Upaya tersebut tentu tidak mudah karena kepentingan yang beragam, sehingga fasilitasi dari pemerintah menjadi penting. Dengan begitu melalui proses dialog dan edukasi, maka kesadaran untuk mulai memanfaatkan IPAL mulai dilakukan.

Bentuk pemeliharaan sungai yang lain ditentukan oleh karakteristik masing-masing wilayah. Gerakan Prokasih yang secara periodik dilakukan pada berbagai titik kawasan, budidaya ikan untuk memantau kualitas air, penghijauan dan tamanisasi untuk memperluas area RTH juga menjadi agenda rutin. Selain itu, terdapat kampung hijau yang berada di pinggir sungai Gajah Wong yang memiliki program penghijauan (Go Green), konservasi satwa dan tanaman yang memiliki daya serap terhadap air. Dengan demikian, gerakan restorasi sungai menggunakan beragam strategi yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang terhubung secara spasial dari hulu hingga hilir sungai sehingga ekosistem sungai menjadi lebih lestari.

Proses politik dalam konteks basis atau elit berlangsung secara formal maupun informal. Dalam konteks basis, pemanfaatan forum-forum informal dalam masyarakat cenderung lebih efektif dibandingkan dengan forum formal. Pada forum formal, beberapa kelompok masyarakat tertentu kurang lugas menyampaikan ide dan gagasannya. Selain itu, pertemuan-pertemuan formal juga sulit untuk diikuti oleh warga dengan profesi tertentu, bahkan pertemuan pada malam hari sulit untuk dihadiri kaum perempuan. Sementara itu, pemanfaatan forum informal tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu serta dilakukan secara natural dan tanpa aturan tertentu. Dengan begitu, forum informal inilah yang lazim dimanfaatkan oleh aktor kunci dalam gerakan untuk membangun kesepakatan, melakukan koordinasi sosial bahkan persiapan sosial secara kolektif, dari hulu hingga hilir sungai. Upaya untuk menciptakan ruang politik dalam gerakan restorasi sungai dapat dilakukan dengan berbagai media, salah satunya dengan musyawarah. Media yang membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak untuk bersuara dalam merancang gerakan maupun melaksanakan gerakan harus dilakukan untuk mengelola keterlibatan publik.

Melalui musyawarah maka proses pembingkai gerakan dapat dirumuskan secara kolaboratif melalui proses mendengarkan, berbagi maupun refleksi selama gerakan restorasi berlangsung (Petts, 2006).

Dalam konteks elit, proses politik tidak bisa dikerjakan oleh semua aktor kunci dalam gerakan restorasi sungai. Terdapat pembagian peran antar aktor kunci untuk melakukan proses politik pada level basis maupun elit. Pada level elit ini, terdapat satu orang aktor yang memiliki peran sentral dalam menggalang dukungan dari sejumlah kementerian, anggota DPRD Kota Yogyakarta melalui proses advokasi dan lobby. Sentralitas aktor tersebut dipandang mampu menyuarakan segenap aspirasi masyarakat secara lugas kepada para pengambil kebijakan tanpa rasa khawatir. Aktor inipun, diakui mampu menggalang dukungan dari berbagai aktor komunitas sungai lainnya di Yogyakarta agar advokasinya memperoleh legitimasi secara kolektif dan politis. Kemampuan membangun jejaring yang bersifat difusi maupun konfliktual antar berbagai pihak inilah yang membuat gerakan restorasi sungai Gajah Wong ini memiliki daya ubah yang lebih besar dibandingkan wilayah sungai yang lain (Krinsky dan Crossley, 2013). Bahkan hasil-hasil gerakan berupa penataan pemukiman melalui M3K, Pemanfaatan air bersih, pengurangan resiko bencana, pengurangan sumber pencemar sungai, pemanfaatan IPAL hingga pengembangan wisata sungai sebagai efek dari gerakan restorasi sungai hampir merata dapat dijumpai pada masing-masing wilayah. Dengan begitu, proses politik yang berlapis dan kemampuan membangun jejaring antar aktor yang intensif adalah modal untuk memperbaiki ekosistem sungai secara lebih progresif. Apabila disajikan dalam bentuk tabel kerangka proses politik dalam gerakan restorasi sungai yang berlapis dapat tergambar dalam serangkaian agensi-agensi sebagai berikut:

Tabel 1: Tabel Proses Politik Berlapis

Level	Proses Politik	Bentuk Agensi
Grassroot	Persiapan sosial masyarakat	Membangun kesadaran dan <i>mindset</i> bersama antar warga melalui dialog, diskusi pada tingkat RT dan RW.
		Edukasi dan kampanye hidup bersih sehat dan tanggap bencana bagi warga bantaran sungai dengan pendekatan kultural
	Melakukan	Pembentukan Kelompok/komunitas

	konsolidasi antar warga bantaran sungai	sebagai wadah untuk merawat dan melestarikan sungai Pembagian wilayah/area gerakan secara spasial dari hulu-hilir sungai Pemetaan potensi wilayah dari hulu-hilir sungai
	Aksi bersama berupa gotong royong dan swadaya dalam rangka restorasi ekosistem sungai	Melakukan aksi bersama untuk bersih sungai secara berkala, penataan pemukiman melalui M3K, mengembangkan bank sampah, pengelolaan air bersih dan pembangunan MCK dan IPAL komunal warga bantaran sungai.
	Proses refleksi dan evaluasi gerakan	Mendorong keberlanjutan dan kemandirian gerakan dengan memberdayakan masyarakat bantaran sungai melalui program wisata sungai.
Elit	Menggalang dukungan, lobby dan advokasi dari para pengambil kebijakan dari unsur eksekutif	Menggalang dukungan pada pengambil kebijakan dalam forum ilmiah berupa sarasehan untuk menemukan solusi bersama atas persoalan sungai yang dihadapi
		Proses lobby dan dialog dengan BAPPEDA untuk mendorong penataan kawasan bantaran sungai.
		Lobby dan dialog dengan kementerian Pekerjaan Umum untuk program IPAL dan MCK Komunal serta program Kotaku bagi pemukiman layak huni di pinggir sungai.
		Mendorong fasilitasi Bank sampah warga bantaran sungai dan Program Kali bersih (Prokasih) oleh BLH
		Mendorong fasilitasi untuk pembentukan kampung wisata sungai
		Memanfaatkan bentuk ikatan kultural antara raja dan rakyatnya.
Menggalang dukungan, lobby dan advokasi dari para pengambil kebijakan dari unsur legislatif	Lobby dan advokasi penganggaran pada pihak legislative bagi revitalisasi sungai Gajah Wong.	

Sumber: Data Primer diolah

Proses politik dapat diperkuat dengan membangun jejaring sosial antar aktor gerakan restorasi sungai yang meliputi lingkup mikro, namun juga pada lingkup mezzo dan makro. Pada lingkup mikro, jejaring sosial aktor antar zona dan titik sungai. Melalui forum pertemuan rutin untuk mendiskusikan perencanaan program dilakukan hampir di semua titik. Sedangkan aksi-aksi bersama berupa kerjabakti dan gotong royong dalam proses M3K maupun aksi bersih sungai juga dilakukan sebagai wujud jejaring konsensual yang telah terbangun. Tentu peran aktor-aktor sentral menjadi penting dalam menjalin dan merekatkan relasi antar aktor tersebut (Diani, 2003). Selain factor peran aktor sentral, factor solidaritas juga menguatkan proses terbangunnya jejaring pada lingkup mikro ini. Solidaritas muncul oleh kesamaan nasib sebagai warga yang tinggal di bantaran sungai dengan status “*ngindung*” di wilayah *wedi kengser* dengan latar sosial ekonomi dari sector informal cenderung menyebabkan mereka mengambil sikap yang sama, yaitu mengikuti segala bentuk program penataan kawasan bantaran sungai. Pada lingkup mezzo, FORSIDAS juga bergabung dalam jejaring antar komunitas sungai yaitu dalam wadah Asosiasi Komunitas Sungai Yogyakarta (AKSY). Sementara pada lingkup makro, jejaring komunitas inipun juga menjadi bagian penting dari Kongres Sungai Indonesia yang menjadi wadah multipihak untuk terus mendorong gerakan restorasi sungai di seluruh Indonesia. Dengan membangun kerangka berjejaring pada lingkup mikro, mezzo hingga makro, maka gerakan restorasi sungai oleh FORSIDAS Gajah Wong akan memiliki kekuatan yang lebih memadai. Sehingga dengan demikian, proses politik yang berlapis harus didukung pula oleh proses membangun kekuatan jejaring sosial agar tujuan gerakan restorasi sungai dapat menemukan titik terang keberhasilannya.

Gerakan restorasi sungai pada akhirnya membutuhkan jaminan keberlanjutan seiring pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan kawasan perkotaan. Terkait dengan hal itu FORSIDAS Gajah Wong mengembangkan beberapa titik unkit pengembangan wisata sungai pada beberapa kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Beberapa titik unkit tersebut adalah Taman Legawong, Gajah Wong Education Park, Bendung Lepen dan Dermaga Cinta. Hadirnya titik unkit wisata sungai

dianggap mampu menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial bagi warga bantaran sungai. Mereka tidak hanya mampu memperoleh pendapatan tambahan melalui aktivitas wisata sungai namun secara sosial kesan dan citra kumuh warga bantaran sungai secara perlahan dapat mulai diperbaiki. Hal ini seturut dengan tujuan gerakan restorasi sungai yang tidak hanya membebaskan sungai dari segala bentuk pencemaran, memulihkan kembali ekosistem sungai akan tetapi menjadi alternatif sumber penghidupan warga bantaran sungai. Dengan demikian pengembangan wisata sungai diharapkan mampu menjadi skema keberlanjutan alternatif gerakan restorasi sungai.

KESIMPULAN

Gerakan restorasi sungai telah menjadi agenda penting dalam merespon persoalan degradasi sungai seiring peningkatan aktivitas manusia. Agensi gerakan restorasi sungai dapat berasal dari berbagai pihak, salah satunya adalah agensi masyarakat. Berbagai bentuk agensi masyarakat sepanjang sungai terwadahi dalam bentuk komunitas sungai. Dengan berbekal kehendak untuk memperbaiki kondisi ekosistem sungai untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat, maka gerakan tersebut mensyaratkan proses politik secara berlapis.

Level basis gerakan menjadi kata kunci penting untuk menjadi titik ungkit gerakan untuk membangun kesadaran bersama tentang urgensi memulihkan kembali sungai yang terdegradasi. Proses konsolidasi dan membangun kesamaan cara pandang menjadi bagian yang tidak terlupa meskipun dilakukan dalam skala spasial. Demikian pula pada level elit pengambil kebijakan dan pentingnya peran aktor sentral untuk menjadi motor penggerak dalam proses menggalang dukungan baik pada jalur eksekutif maupun legislative. Selain itu, membangun jejaring sosial antar komunitas sungai dan mengembangkan skema pemberdayaan masyarakat dapat memperkuat proses politik pada level basis dan elit bahkan menjadi bagian penting dari agenda keberlanjutan gerakan. Dengan demikian, proses politik menjadi berlapis-lapis, baik dari segi prosesnya maupun aktor-aktor yang terlibat di dalam gerakan restorasi sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda DIY, 2012. Penyusunan Grand Desain Sungai Gajah Wong. Tidak diterbitkan.
- Badan Lingkungan Hidup DIY, 2015. Buku Data SLHD DIY 2015. <http://dlhk.jogjapro.go.id/storage/files/Buku%20Data%20SLHD%20DIY%202015.pdf> Diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 14.53 WIB.
- Diani, Mario, 2003. Networks and social movements: a reserach programme. Pages 299–319 in M. Diani and D. McAdam, editors. Social movements and networks: relational approaches to collective action. Oxford University Press, Oxford, UK.
- Eden, S., and S. M. Tunstall (2006), Ecological versus social restoration? How urban river restoration challenges but also fails to challenge.
- Firman, Tommy, 2004. Demographic and Spatial Patterns of Indonesia's Recent Urbanisation POPULATION, SPACE AND PLACE Popul. Space Place 10, 421–434 (2004) Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/psp.339
- Fox et al. 2017. The river is us; the river is in our veins”: re-defning river restoration in three Indigenous communities. Sustain Sci (2017) 12:521–533. DOI 10.1007/s11625-016-0421-1.
- Frascaroli, Fabrizio, Parrinello, Giacomo, dan Root-Bernstein, Meredith, 2021. Linking contemporary river restoration to economics, technology, politics, and society: Perspectives from a historical case study of the Po River Basin, Italy. Ambio. Feb; 50(2): 492–504. Published online 2020 Jul 22. doi: 10.1007/s13280-020-01363-3.
- Hardin, Garrett, 1968. The Tragedy of the Commons. From Science, 162(1968):1243-1248.
- Khudori, Darwis. 2002. Menuju Kampung Pemerdekaan. Yayasan Pondok Rakyat. Yogyakarta.
- Krinsky, John dan Crossley, Nick, 2014. Social Movements and Social Networks: Introduction, Social Movement Studies, 13:1, 1-21, DOI: 10.1080/14742837.2013.862787

- Kusnanto, dkk., 2016. Community Engagement With Urban River Improvement. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* .Vol 23, No 3 (2016). DOI.org/10.22146/jml.22484.
- Kutanegara, Pande Made, 2014. *Manusia, Lingkungan dan Sungai*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Maryono, Agus. 2007. *Restorasi Sungai*. Gadjah Mada Press. Yogyakarta
- Mauer K. Whitney, 2020. U n d a m m i n g The Elwha River. *Contexts*, Vol. 19, Issue 3, p. 34-39. ISSN 1536-5042. © American Sociological Association. SUMMER 2020 contexts 35. <http://contexts.sagepub.com>. 10.1177/1536504220950399
- Mertig, Angela dan Dunlap Riley, 2001. Research Note. Environmentalism, New Social Movements, and the New Class: A Cross-National Investigation. *Rural Sociology* 66(1), 2001, pp. 113–136. Copyright © 2001 by the Rural Sociological Society.
- Millennium Ecosystem Assessment (2005) *Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis* (Island Press, Washington, DC).
- Noviana Sari, Pathurrahman dan Siti Mauliana Hairani, 2018. The 3rd “Kongres Sungai Indonesia” as Hybrid Social Movements: The New Combination between Classic Social Movements and New Social Movements. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 292. 1st Aceh Global Conference (AGC 2018). Published by Atlantis Press.
- Patra, Debjyoti and Bandyopadhyay, Sumahan, 2019. River and Environmental Movement. *Indian Anthropologist*, July – December 2019, Vol. 49, No. 2 (July – December 2019), pp. 57-73 <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26954859>
- Petts, Judith, 2006. Managing Public Engagement to Optimize Learning: Reflections from Urban River Restoration. *Human Ecology Review*, Vol. 13, No. 2, 2006 © Society for Human Ecology.
- Seftyono, Cahyo, 2012. Pembangunan Berbasis Waterfront dan Transformasi Konflik di Bantaran Sungai: Sebuah Pemikiran Awal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIPOL UGM* Vol 16, No 1 (2012) <https://doi.org/10.22146/jsp.10913>.

- Sholihah, M dan Zunariyah, S. 2019. Gerakan Ecoton Dalam Pemulihan Sungai Brantas. *Journal of Development and Social Change*, Vol. 2, No. 1, April 2019 p-ISSN 2614-5766, <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>.
- Suharko & Kusumadewi, 2019, Organisasi Masyarakat Sipil dan Restorasi Sungai: Studi pada Gerakan Memungut Sehelai Sampah di Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda
- Tarrow, S. (1994) *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics* (Cambridge: theory. *American Journal of Sociology* 82(6):1212–1241.
- Vermaat, et al, 2016. Assessing the societal benefits of river restoration using the ecosystem services approach *Hydrobiologia* 769:121–135. DOI 10.1007/s10750-015-2482-z.
- Yin, Robert K, 1996. *Studi Kasus (Desain dan Metode) Edisi Revisi*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Vörösmarty dkk., 2010, Global threats to human water security and river biodiversity. *Nature* 467, 555–561 (2010). Macmillan Publishers Limited. All rights reserved.
- Zunariyah, S dan Ramdhon, A, 2017a, “Memetri Kali” as transformative learning model for sociology students to care about environmental issues. *Regionalization and Harmonization in TVET* –Abdullah et al. (Eds) © 2017 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-05419-6
- Zunariyah, S. and Ramdhon, A., 2017b, Urban Youth Movement: Works of Young People in Reproducing Knowledge of River- Kampong with Community, In 2nd International Conference on Sociology Education (ICSE 2017), pages 948-952 ISBN: 978-989-758-3162.